

**ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN PERCEKCOKAN
ATAS DASAR PINDAH AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi di Pengadilan Agama Surakarta)**



Tesis

**Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Program Studi
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**SUCI KARYANA, SH
B4B 005 230**

**Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro
Semarang
2007**

TESIS

**ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN PERCEKCOKAN
ATAS DASAR PINDAH AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi di Pengadilan Agama Surakarta)**

Oleh :

SUCI KARYANA, S.H.
B4B 005 230

**Telah dipertahankan didepan tim penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

	Semarang,
	Ketua Program Studi
Pembimbing	Magister Kenotariatan

Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.
NIP. 130 354 857

H. Mulyadi, S.H., M.Si.
NIP. 130 529 429

MOTTO

*"ALLAH MEMBERIKAN HIKMAH KEPADA SIAPA YANG
DIKEHENDAKI-NYA. DAN BARANG SIAPA YANG DIBERI
HIKMAH, SUNGGUH TELAH DIBERI KEBAJIKAN YANG
BANYAK, DAN TIDAK ADA YANG DAPAT MENGAMBIL
PELAJARAN, KECUALI ORANG-ORANG YANG BERAKAL".
(QUR'AN 2 : 269)*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas berkat dan rahmat Nya sehingga bisa terselesaikannya tesis dengan judul "Alasan Perceraian disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama dan Akibat hukumnya" (Studi di Pengadilan Agama Surakarta).

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini antara lain :

1. Bpk. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotaritan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan fasilitasnya.
2. Bpk. Prof Abdullah Kelib, S.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bpk. Sonhaji, S.H., M.Hum. selaku tim review yang telah memberikan saran dan masukan.
4. Bpk. Yunanto, S.H., M.Hum, selaku tim review yang telah memberikan saran dan masukan.
5. Bpk. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku tim review yang telah memberikan saran dan masukan.
6. Ayah dan ibunda terima kasih atas doa, dan perhatiannya selama ini.
7. Seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan baik moril dan materiil, selama penyusunan tesis ini.
8. Bpk. Drs. Zaenuri, M.Hum, selaku Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, terima kasih atas saran dan pendapatnya.

9. Bpk. Raharjo, S.H, M.Hum, selaku Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, terima kasih atas saran dan pendapatnya.
10. Bpk. Drs. Domiri, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, terima kasih atas saran dan pendapatnya.
11. Bpk. Edy Iskandar, S.H., selaku Panitera di Pengadilan Agama Surakarta, terima kasih atas bantuannya.
12. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan semangat yang diberikan selama penulis belajar di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang serta telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan teis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Saran dan masukan dari semua pihak penulis harapkan demi perbaikan dimasa datang.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada khususnya dan bagi ilmu hukum pada umumnya.

Semarang, Agustus 2007

Penulis

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Perkawinan dapat putus karena alasan percekcoan atas dasar pindah agama. Percekcoan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perceraian disebabkan percekcoan atas dasar pindah agama dan bagaimana akibat hukum perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama terhadap harta dan anak, kedua permasalahan tersebut saling berkaitan. Untuk itulah kedua permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empirik dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Adapun responden dalam hal ini adalah pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Surakarta dan pasangan suami istri yang melakukan perceraian disebabkan percekcoan atas dasar pindah agama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung yang berbentuk observasi dan wawancara, selain itu digunakan bahan kepustakaan. Dalam metode analitis data dipergunakan analitis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian disebabkan percekcoan atas dasar pindah agama dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut. Perceraian membawa akibat terhadap pemeliharaan anak dan pembagian harta dalam perkawinan, yang dapat diselesaikan/diputuskan bersama-sama dengan putusan perceraian.

Kata kunci : alasan perceraian, cekcok, dan akibat hukum pindah agama

ABSTRACT

The purpose of marriage is for attaining th material and spiritual happiness. The marriage can be broken down because of qurrelling based on religion alteration. That quarrelling is possibly results crack within family, thus finally decided to submit divorce case to the court.

The cases of divorce closely related with (1) how legal consideration that applied by religion court's judges when decide divorce because of quarrelling on base of religion alteration, and (2) what is the divorce legal impact because of quarrelling on base of religion alteration toward their properties and children. The both issues mentioned previously will be discussed in this research.

Author performed research through empirical juridical approach method with analytical descriptive research specification. Sampling conducted in purposive sampling method. While respondents within this case were any related parties, they were judge of Surakarta Religion Court and spouse couple whom take divorce caused by quarrelling based on religion alteration. Data gathering method performed by dire ct observation and interview, beside that, literature matter study also be used. Data analytical used qualitatively data analytic.

Results showed that mostly divorce reasons caused by quarrelling of religion alteration can for submitting divorce proposal on the religion court. Any stipulations within Article 116 lter h of Islamic Compilation Law states that religion alteration or murtad which caused disharmony ini the family. In his legal consideration, judge will evaluate if the marriage had broken based on evidences, witnesses, and his conviction about such marriage condition. Divorce bring many consequences toward children rearing and property separation in the marriage, which may solve/decided together by divorce decisions.

Keywords : divorce reasons, quarrel and legal consequence of religion alteration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	8
2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan	9
A. Tujuan Perkawinan	12
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan	18
A. Akibat Hukum Pindah Agama (Murtad)Terhadap Perkawinan	20
B. Alasan Perceraian	24
F. Akibat Perceraian	30
1. Akibat Perceraian Terhadap Anak	30
2. Akibat Perceraian Terhadap Harta	35

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Pendekatan	40
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Populasi dan Penentuan Sampel	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Penyajian Data	44
F. Metode Analisa Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
B. Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam memutus perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama	46
B. Akibat hukum perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama	77
1. Terhadap Anak	77
2. Perceraian Terhadap Harta	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HOCl S.1933-74, begitu pula Peraturan Perkawinan Campuran RGH S.1898 No.158 dan juga peraturan dalam KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang perkawinan atau peraturan lain yang mengatur perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelasnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (termasuk hukum adat dan hukum agama) sudah tidak berlaku lagi.¹⁾

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain hubungan tersebut dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin atau hubungan non formil yakni ikatan yang tidak dapat dilihat maupun tidak nyata tetapi hubungan tersebut harus tetap ada dalam perkawinan.

Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama. Hal ini telah tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ke-tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting: membentuk keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan

¹⁾ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1990, hal. 6

*dari perkawinan, pemerintahan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.*²⁾

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hubungan agama dengan perkawinan dipertegas lagi dalam Pasal 8 (F) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri kalau ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi.

²⁾ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1986, hal 161-162.

Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor antara lain pefceckolkanjm atas dasar pindah agama.

Dalam kehidupan bernegara orang bebas untuk meyakini salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain.

Dalam Al Qur'an diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam Surat Mumtahanah ayat 10 mengenai murtad yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-permpuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁾

³⁾ Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : Kumudasmoro, 1994, hal. 924-925.

Pindah agama akan membawa akibat hukum bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan telah melaksanakan perkawinan. Bagi orang yang hendak menikah pentingnya agama berkaitan dengan lembaga yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk yang beragama selain Islam. Sedangkan bagi orang yang akan bercerai pentingnya agama berhubungan dengan lembaga berwenang untuk menyelesaikan perceraian mereka. Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian yaitu Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dengan Pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Pindah agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan percekcoan dalam rumah tangga karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Percekcoan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah

tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Perceraian dengan alasan murtad dicantumkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Perceraian membawa akibat antara lain dalam hal status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta bersama antara suami istri.

B. Permasalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suarakarta dalam memutus perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama ?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suarakarta dalam memutus perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata perkawinan

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah: pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing, *sakinah* (pergaulan yang aman dan tenteram), *mawaddah* (saling mencintai dan saling mengasihi) dan *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah

dalam Al Qur'an untuk melaksanakan perkawinan diantaranya dalam surat An-Nur ayat 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahaya-Mu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya-Mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya.

Selanjutnya hal tersebut terdapat dalam Hadits Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadits) atau jamaah ahli hadits.

Hai pemuda barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.

Dari hadits Rasul ini jelas dapat dilihat bahwa perkawinan itu dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa definisi Perkawinan dicantumkan Pasal 1 yang menyatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri
- b. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan lahir batin serta tujuan bahagia dan kekal tersebut berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kamal Mukhtar memberikan definisi Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁴⁾

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.⁵⁾

⁴⁾ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hal. 8.

⁵⁾ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1990, hal. 10.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶⁾

Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan.⁷⁾

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya untuk kepuasan lahir dan batin belaka. Tujuan utama menikah yaitu untuk beribadah kepada Allah, disebut beribadah kepada Allah karena adanya perkawinan sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya.

⁶⁾ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1976, hal. 23.

⁷⁾ Ahmad Kuzari, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, Jakarta : Rajawali Pers, 1995, hal. 1

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan dan memperkembangbiakkan laki-laki perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam rumusan pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain memberikan definisi perkawinan, juga sekaligus memuat tujuan perkawinan, yaitu pada kalimat dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan :

- a) Berlangsung seumur hidup.
- b) Diperlukan syarat-syarat yang ketat bagi upaya perceraian dan merupakan jalan terakhir
- c) Suami istri itu membantu untuk dan saling membela satu sama, saling memerlukan lain.

Tujuan dan faedah perkawinan dibagi dalam 5 (lima) hal yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam perkawinan mereka tujuan yang pokok dan penting baik bagi dirinya pribadi maupun untuk kepentingan yang bersifat umum.

- b. Untuk mencapai tuntutan naluri atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁸⁾

Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Rukun Perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

7. Sighat (ucapan akad)

Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari calon istri dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah,

⁸⁾ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta : Liberty, 1986, hal. 42

karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad, SAW yang mengatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.⁹⁾

Sighat ini cukup dengan perkataan wali (ijab) “ Saya nikahkan engkau dengan si Fulanah (nama pengantin perempuan)” atau “saya nikahkan engkau dengannya”. Dan pengantin laki-laki berkata (qabul) “Saya mengawininya” atau saya menikahnya” atau “Saya terima kawin “ atau “Saya rela dengan pernikahan itu”.

8. Pihak-pihak yang hendak melaksanakan Perkawinan

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna

Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya.

⁹⁾ Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi, Jakarta : Mustaqiin, 2003, hal. 140.

- b. Berakal sehat
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.¹⁰⁾

Sebelum melaksanakan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

a. Pengantin Perempuan

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah hukumnya menikahi perempuan mukhrimah (yang haram untuk dinikahi).

Untuk calon pengantin perempuan syaratnya :¹¹⁾

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Tertentu (jelas orangnya)
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terkena halangan perkawinan
- f. Diluar 'iddah (bagi janda)
- g. Tidak sedang mengerjakan haji

¹⁰⁾ Ibid, hal. 146

¹¹⁾ Ibid, hal. 138

b. Pengantin laki-laki

Disyaratkan bagi pengantin laki-laki adalah adanya kehalalan untuk dinikahi. Adapun syarat-syarat calon pengantin laki-laki adalah : ¹²⁾

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Tertentu (jelas orangnya)
- Tidak terkena halangan perkawinan
- Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
- Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
- Belum mempunyai empat orang istri

3. Wali

Adapun syarat-syarat menjadi wali, yaitu :

a. orang Mukallaf

yaitu orang-orang yang dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Muslim ¹³⁾

4. Dua orang saksi

Syarat-syarat dua orang saksi :

- a. Hendaknya dia beragama Islam
- b. Kedua saksi itu hendaknya sudah baligh (dewasa)
- c. Kedua saksi itu hendaklah berakal

¹²⁾ Ibid, hal. 139.

¹³⁾ Kamal Mukhtar, Op. Cit, hal. 94-97.

- d. Kedua saksi itu hendaklah merdeka
- e. Kedua saksi itu hendaklah laki-laki
- f. Kedua saksi itu hendaklah adil
- g. Kedua saksi itu hendaklah bisa mendengar
- h. Kedua saksi itu hendaklah bisa melihat
- i. Kedua saksi itu hendaklah bisa berbicara ¹⁴⁾

Syarat untuk menjadi saksi yaitu :

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Mengerti maksud akad perkawinan ¹⁵⁾

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak dalam hal ini adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban begitu pula dengan istri yang disebutkan dalam surat Al Baqarah (2) ayat 228 :

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Ayat ini menjelaskan, bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak dan

¹⁴⁾ Ibid, hal. 94

¹⁵⁾ Ibid. hal. 98

kedudukan istri setara dan seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meski demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Dalam hadis Nabi, hadis dari Amru bin Al-Ahwash:

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁶⁾

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
2. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
3. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
4. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
5. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan nak-anak dengan orang tua.
6. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
7. Bapak berhak menjadi wali bagi anak perempuannya.

¹⁶⁾ Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan, Jakarta : Sinar Grafika, 1987, hal 23.

8. Bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap nak-anak dan hartanya.

Kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Kewajiban yang bersifat materi (Nafaqah)

Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rejeki dan sebaliknya istri bukan pencari rejeki. Nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah biasa disebut juga pemenuhan sandang, pangan dan papan.

2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

- a. Bergaul istri secara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan suami istri, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan juga suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai menyakiti perasaan istrinya.
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan dosa, maksiat atau kesulitan.
- c. Kewajiban suami untuk mewujudkan perkawinan yang mawaddah, rahmah, dan sakinah dengan cara memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.¹⁹⁾

¹⁹⁾ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Media : Jakarta, 2006, hal. 160

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada kewajiban dalam bentuk non-materi. Kewajiban yang bersifat non materi itu adalah :²⁰⁾

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat.
4. Menjaga diri dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
5. Menjauhkan dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Dari uraian diatas kewajiban keduanya secara bersama dalam perkawinan yaitu:

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dalam perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

²⁰⁾ Muhammad Idris Ramulyo, Op. Cit, hal. 23.

D. Akibat Hukum Pindah Agama (Murtad) Terhadap Perkawinan

Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.²²⁾ Murtad berarti berbalik belakang, berbalik menjadi kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.²³⁾

Sebagaimana diketahui bahwa beragama ataupun tidak beragama adalah sebuah pilihan demikian juga dalam hal pindah agama (murtad). Dasar seseorang memilih agama adalah : karena kecocokan secara pribadi dengan ajaran agama tersebut, terkondisi oleh bimbingan dan didikan orang tua dan karena terpengaruh oleh lingkungan sekitar tempat tinggal, tempat mendapat pendidikan atau tempat bekerja, atau karena alasan demi sahnya perkawinan maka salah satu pihak berpindah agama.

Riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau tinggal saja tidak beragama, sedangkan tadinya memeluk agama Islam.²⁴⁾ Syarat-syarat yang ditentukan oleh agama untuk peralihan adalah berlainan dari satu agama dengan agama yang lain : misalnya untuk “masuk” dalam agama Islam harus mengucapkan syahadat, sedangkan “keluar” daripada agama Islam dengan jalan riddah (murtad).

²²⁾ WJS. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hal. 685

²³⁾ Ibid, hal. 685.

²⁴⁾ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru, 1992, hal. 410.

Kata murtad menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan riddah atau menunjuk padaperbuatan riddah, sedangkan riddah menunjukkan pada aspek pelakunya.

Namun ada juga perpindahan agama dalam perkawinan dilakukan karena kesadaran pribadi orang yang bersangkutan disebabkan proses pengenalan dan pemahaman terhadap agama yang akan dia anut juga disebabkan faktor lingkungan seperti teman, suami atau istri dan yang mutlak adalah faktor hidayah dari Allah SWT

Dalam masyarakat memang banyak terjadi perkawinan yang semula berdasarkan pada tata cara Islam kemudian salah satu atau keduanya berpindah agama. Ada berbagai pendapat mengenai akibat hukum perkawinan karena pindah agama (murtad) dari segi hukum Islam yaitu :²⁵⁾

1. Pendapat Imam Syafii, Imam Malik dan Abu Yusuf, hukum pernikahan mereka adalah batal. Jadi bukan thalak. Sebab yang menjadi motif atau sebabnya adalah perbedaan agama, seperti halnya kalau salah satunya murtad.
2. Pendapat Abul Abbas, Abu Hanifah dan Muhammad, menganggap hal itu sebagai thalak manakala si isteri masuk Islam dan sang suami enggan. Sebab penolakan si suami untuk masuk Islam adalah seperti thalak.

²⁵⁾ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar Jilid VI, Semarang : Asy Syifa, 2001, hal. 94

3. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa dengan hanya karena masuk Islam maka perceraian itupun terjadi tanpa harus ditergantungkan pada apakah si isteri telah lewat masa iddahnya atau tidak. Jadi statusnya adalah sama seperti penyebab-penyebab perceraian lainnya : misalnya karena undur sepersusuan, khulu' atau talak itu sendiri.
4. Dikatakan dalam kitab Al Bahr, bahwa apabila salah satu dari kedua pasangan suami isteri masuk Islam dan bukan keduanya, maka batallah pernikahan. Hal ini adalah berdasarakan kesepakatan para ulama (ijma').

Permasalahan pindah agama (murtad) dalam perkawinan ditegaskan dalam beberapa surta didalam al Qur'an :

1. Surat Al Mumtahanah ayat 10 yang artinya :

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."

2. Surat Al Mumtahanah ayat 11 yang artinya :

"... Isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir... Bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar..."

3. Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya :

"... Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah..."

4. Surat Al Baqarah ayat 221 yang artinya :

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman..."

5. Hadits Nabi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinan itu atau apakah dia ingin difasakhkan.

Dalam hal pindah agama (murtad) apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, maka pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkawinan, meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi terfasakh (batal). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya.

D. Perceraian dan Alasan-alasannya

Dalam suatu rumah tangga apabila terjadi ketegangan, kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak akan dapat menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi pertengkaran antara suami istri yang semakin larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut. Apabila suatu perkawinan itu dilanjutkan maka pembentukan

rumah tangga yang damai, bahagia dan tentram yang seperti disyariatkan oleh agama tidak akan tercapai dan ditakutkan akan terjadi pula perpecahan dalam suatu keluarga yang semakin meluas. Agama Islam, mensyaratkan perceraian itu merupakan jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang benar-benar merasa gagal dalam membina keluarga atau rumah tangganya.

Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ada 2 :

1. Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh suami atau istri yang diajukan kepada pengadilan negeri/pengadilan agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut talaq yang menurut bahasa artinya melepas ikatan. Sedangkan menurut istilah (agama) artinya melepas ikatan perkawinan atau terputusnya hubungan perkawinan yang pernah ada antara suami dengan istrinya.

Menurut asalnya talaq itu hukumnya makruh. Makruh artinya sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan, tetapi bila tidak dilakukan perbuatan itu maka ia mendapatkan pahala. Mengenai talaq dikatakan makruh berdasarkan Hadits Rasulullah dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu daud dan Ibnu Majah yang artinya

“Barang yang halal yang amat dibenci Allah yaitu thalaq.”

Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 19 :

“.... Bergaullah dengan istrimu itu menurut patutnya maka jika kamu benci kepadanya, janganlah segera menjatuhkan tahalaqnya. Barangkali kamu benci pada sesuatu perkara, sedang Allah menjadikan kebajikan yang banyak didalamnya.”

Syarat suami untuk men-talaq adalah :

1. Suami mestilah seseorang yang telah dewasa.
2. Sehat akalnya, bil talaq dilakukan oleh orang gila maka talaqnya tidak sah dalam hal ini termasuk mabuk
3. Suami yang menjatuhkan talaq harus menyadari perbuatannya dan atas kehendak sendiri atau dalam keadaan tidak terpaksa.

Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut thalaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri disebut khulu’
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Inisiatif untuk bercerai bisa datang dari pihak suami atau pihak istri :

1. Atas inisiatif suami
2. Atas inisiatif istri
3. Atas persetujuan kedua belah pihak
4. Melalui putusan pengadilan.²⁶⁾

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan perkawinan.

Untuk itulah ditentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-

²⁶⁾ Amir Syarifuddin, Op. Cit. 197.

Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁷⁾

Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan diatas dimasukan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, namun ada tambahan yaitu pada huruf g dan h yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

²⁷⁾ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan, Surabaya, Airlangga University Press, 1986, hal. 128.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan ajaran Islam masing-masing suami isteri harus sekufu (kesamaan derajat). Ke- 4 (empat) mazhab yaitu Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa kufu harus dipenuhi dalam perkawinan ialah segi agama.²⁸⁾

Jika dalam perkawinan itu salah satu pihak beralih agama (murtad) maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai sebab pandangan hidup suami isteri itu berbeda. Kehidupan rumah tangga yang semula bahagia, dengan murtadnya salah satu pihak yaitu suami atau isteri menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Perselisihan antara suami isteri ini dalam hukum Islam disebut Syiqaq.²⁹⁾

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 menegaskan bahwa :

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan dengan suami isteri.
2. Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang

²⁸⁾ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Op. Cit. 251.

²⁹⁾ Amir Syarifuddin, Op. Cit., hal. 194.

atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam.

Ketentuan untuk mengangkat hakam dari keluarga masing-masing pihak suami isteri ini sesuai dengan Al Qur'an surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami isteri, hendaklah kamu angkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan hakam (wasit) dari keluarga isteri; apabila para wasit mengusahakan baiknya hubungan suami isteri, maka Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami isteri bersangkutan.

Apabila dimuka disebutkan bahwa syiqaq merupakan tingkat terakhir dari perselisihan antara suami isteri, sebelum sampai syiqaq terlebih dulu harus ada usaha dari suami isteri untuk memperbaiki hubungan mereka dalam hidup perkawinan, maka akhirnya akan dapat diperoleh ketentuan bahwa perceraian jangan sampai terjadi sebelum sampai syiqaq yang akan diselesaikan melalui pengangkatan hakam oleh ulul amri atau pengadilan. Untuk memperoleh kepastian hukum. Apa yang diputuskan oleh hakam akan dikuatkan oleh Pengadilan Agama.³⁰⁾

Perceraian yang dilakukan dimuka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara

³⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1974, hal 82.

suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perceraian apabila perselisihan antara suami isteri jika bberakhir dengan perceraian akan menyelamatkan suami isteri dari penderitaan-penderitaan lahir dan batin yang tidak menguntungkan dalam hubungan perkawinan mereka.

F. Akibat Perceraian

F.1. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Perceraian membawa akibat dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajiban tersebut terutama bagi anak-anaknya yang belum cukup umur (mumayiz) sehingga kepentingan si anak terlindungi.

Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga atau pun dengan keputusan pengadilan.

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut hadanah. Secara etimologis, hadanah ini berarti disamping atau berada dibawah ketiak. Sedang secara terminologisnya, hadanah merawat dan mendidik

seseorang yang belum mumayiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemeliharaan anak yaitu :

A. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 :

I. Pasal 41 berbunyi :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

II. Pasal 45 berbunyi :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

B. Dalam Kompilasi Hukum Islam :

I. Pasal 105 berbunyi :

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**
- b. **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya.**
- c. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

II. Pasal 156 berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. **Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :**
 1. **Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu**
 2. **Ayah**
 3. **Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah**
 4. **Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan**
 5. **Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu**
 6. **Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.**
- b. **Anak-anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadahanah dari ayah atau ibunya.**

- c. **Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula**
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pemeliharaan anak ini mencakup masalah hak atas nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan kesejahteraan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memenuhinya samapai anak dewasa atau sebelum itu telah kawin.³⁴⁾

³⁴⁾ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hope, 1999, hal. 415.

F.2. Akibat perceraian terhadap harta

Adanya perkawinan mengakibatkan adanya harta kekayaan dalam perkawinan, dimana selama dalam perkawinan harta yang diperoleh merupakan harta bersama, dalam perjalanan hidup berumah tangga.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Harta bersama tersebut dikuasai secara bersama antara suami istri, masing-masing bertindak terhadap harta tersebut dengan persetujuan pihak yang lain.³⁷⁾

³⁷⁾ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : UI Press, 1985, hal. 78.

Pengaturan harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam beberapa pasal yaitu :

I. Pasal 35 :

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.**
- 2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.**

II. Pasal 36 :

- 1. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**
- 2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum**
- 3. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bendanya.**

III. Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka bagi mereka yang kawin menurut hukum Islam terhadap harta bersama dalam Perkawinan diatur dalam 2 Pasal yaitu :

I. Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatanh perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

II. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak sperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan yang terdapat dalam suatu keluarga, apabila dilihat dari beberapa tinjauan maka harta tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari asal-usulnya harta suami itu dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

- a. **Harta masing-maaing suami istri yang telah dimiliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau uasaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.**
- b. **Harta masing-masing suami istri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik orang seoerang atau bersama- sama, tetapi merupakan hibah wasiat atau warisan untuk masing-masing.**

- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang diantara mereka atau disebut harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk :
- a. **Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.**
 - b. **Harta kekayaan yang lain.**
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perseorangan dalam masyarakat, harta itu berupa :
- a. **Harta milik bersama**
 - b. **Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keduanya**
 - c. **Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.**⁴⁰⁾

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam perkawinan adalah pada penguasaan dan pembagiannya. Penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, sedangkan pembagian harta bersama harus dilakukan ketika terjadi perubahan struktur keluarga, baik perkawinan putus atau terjadi.

Pembagian tersebut dapat dilaksanakan melalui sidang di pengadilan atau dapat juga dilaksanakan diluar persidangan pengadilan, yakni dengan musyawarah para pihak.

⁴⁰⁾ Sayuti Thalib, Op. Cit., hal. 82.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah pada umumnya tentu dilakukan penelitian terlebih dahulu, karena penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memperoleh pengetahuan baru atau memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan atau pemecahan atas suatu masalah.

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.⁴¹⁾

⁴¹⁾ Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, Yogyakarta : BPFE, 1991, hal. 1

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴²⁾

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis menekankan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini yang sumbernya pada data sekunder. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer sehingga akan diperoleh kejelasan permasalahan yang diteliti.⁴³⁾

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh

⁴²⁾ Soetrisno Hadi, Metodologi Reseach, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 7.

⁴³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1990, hal. 9.

mengenai segala hal yang berhubungan alasan perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama dan akibat hukumnya.

C. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, maka cukup diambil sebagian saja untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Penentuan sampel ini dilaksanakan berdasarkan purposive sampling. Menurut Roni Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.⁴⁵⁾

Sample penelitian ini adalah unit-unit yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yaitu hakim Pengadilan Agama Surakarta dan pasangan suami istri yang melakukan cerai karena pindah agama. Sedangkan responden dalam hal ini adalah:

1. 3 (Tiga) hakim Pengadilan Agama Surakarta.

⁴⁵⁾ Ibid, hal. 3 5.

2. 2 (Dua) pasangan yang melakukan cerai karena pindah agama.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini maka data yang dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder sebanyak mungkin. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang, literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para sarjana serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data awal yang nantinya dapat digunakan dalam penelitian lapangan.

b. Penelitian lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari responden yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden tersebut nantinya akan diperoleh data primer. Data primer inipun dihimpun dengan mengadakan wawancara.

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden sehingga informasi yang diperoleh dengan bertanya secara langsung dengan yang

diwawancarai. Dalam proses ini peneliti berfungsi sebagai pencari informasi dari pihak lawannya yaitu responden yang berfungsi sebagai pemberi informasi.

Proses tanya jawab dilakukan dengan tanya jawab bebas terpimpin (free flowing interview). Kegiatan ini dilaksanakan dengan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang dapat berfungsi untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan pokok pengertian, walaupun telah dilandasi dan berpedoman dalam daftar pertanyaan dalam wawancara juga dimungkinkan adanya variasi pertanyaan.

E. Metode Penyajian Data

Dalam proses ini akan diadakan editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang akurat dan lengkap diikuti dengan pengambilan kesimpulan tertentu atas dasar penelitian yang ada.

46)

Hasil penelitian tersebut akan disajikan dalam suatu laporan tertulis ilmiah yaitu dalam bentuk tesis. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif.

⁴⁶⁾ Ibid, hal. 64

Yang dimaksud dengan kualitatif adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada data-data kualitatif yang telah berhasil dikumpulkan. Selanjutnya akan disusun secara sistematis, logis, yuridis dan konsisten.

Sehingga dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari obyek permasalahannya kemudian dideskripsikan dalam penulisan hukum.

F. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian karena cekcok atas dasar pindah agama

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan

dalam keluarga tentunya jalan perceraian tidak akan diambil. Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian yaitu Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim dan dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dengan Pengadilan, yang tercantum dalam Psal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan pengadilan negeri bagi gugata-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris

- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Prosedur pemeriksaan perkara perceraian dimuka sidang pengadilan adalah :

1. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, baik pemeriksaan terhadap pihak-pihak maupun para saksi. Oleh karena pemeriksaan perkara perceraian menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi, maka adalah tepat dilakukan secara tertutup.
2. Peranan hakim dalam prosedur perceraian ini, adalah bukan hanya secara aktif memeriksa perkara perceraian yang diakhiri dengan memutuskan perceraian, tapi berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian. Usaha perdamaian bukan hanya pada sidang pertama, tapi juga pada sidang-sidang berikutnya selama pemeriksaan berlangsung.
3. Pemeriksaan gugatan perceraian diadakan secara cepat.
4. Perceraian terjadi saat pendaftaran kepengadilan bagi orang-orang yang beragama non Islam dan bagi yang beragama islam putusan

pengadilan tentang perceraian berlaku sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama.⁴⁷⁾

Apabila terjadi sengketa diantara suami istri dan bermaksud akan mengakhiri perkawinan mereka karena pindah agama (murtad) dapat diselesaikan dengan dasar hukum ikatan perkawinan tersebut dilakukan. Jika ikatan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih kepada agama lain atau pindah agama, maka yurisdiksinya tunduk pada Pengadilan Agama dan hukum yang berlaku tetap hukum Islam. Sebaliknya pada saat terjadi hubungan hukum itu, keduanya atau salah satu belum beragama Islam, kemudian pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satunya sudah beragama Islam, maka pada diri mereka tidak melekat asas personalitas ke Islaman, tetapi tunduk pada hukum saat mereka menikah. Hal ini berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung RI No.30/TUADA-AG/III-UM/8/1983.⁴⁸⁾

Mengenai bukti-bukti seseorang beragama Islam atau tidak, faktanya cukup dilihat pada identitas yang dimiliki orang tersebut, seperti Kartu Tanda Penduduk, SIM atau tanda bukti lainnya. Jika dilihat dari patokan personalitas ke Islaman yang dijadikan dasar pada “saat terjadi” hubungan hukum maka ada dua syarat yang harus diperhatikan yaitu :

⁴⁷⁾ R. Soetojo Prawieohamidjojo dan Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Surabaya : Airlangga University Press, Hal. 182.

⁴⁸⁾ Zaenuri, SH, Wawancara, hakim Pengadilan Agama Surakarta, 15 Juni 2007

- a. Pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini nyaiu perihal perceraian dengan alasan pindah agama (murtad), maka ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh yakni cerai gugat merupakan upaya pihak isteri untuk bercerai dari suami dan cerai talak yakni upaya pihak suami bercerai dari isterinya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang menjadi kasus di Pengadilan agama antara lain disebabkan poligami yang tidak benar, krisis akhlak, cemburu, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, meninggalkan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, kawin paksa, masalah ekonomi, kawin dibawah umur , penganiayaan, salah satu pihak dihukum penjara, cacat biologis, percekcoan karena beda keyakinan dan percekcoan atas dasar pindah agama.⁴⁹⁾

Suami istri memutuskan untuk bercerai karena dilatarbelakangi oleh adanya faktor-faktor atau alasan-alasan tertentu. Alasan perceraian karena percekcoan atas dasar pindah agama diakui dan diterima oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan penyebab perceraian. Apabila karena pindah agama saja sebagai alasan perceraian tentu saja tidak dapat diterima

⁴⁹⁾ Raharjo, SH, Wawancara, hakim Pengadilan Agama Surakarta, 16 Juni 2007

harus ada unsure karena precekcokan karena pindah agama yang telah menyebabkan sutau ketidak rukunan lagi dalam rumah tangga. Perumusan alasan perceraian tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (H) dan ini sering dipakai oleh hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan hakim selain itu tidak lepas tentunya dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam Padal 39 undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Mengenai hukum acara persidangannya yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan umum.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pindah agama (murtad) Majelis Hakim terlebih dahulu mennetukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan
- b. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.

- c. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara permohonan cerai talak atau cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap kali persidangan.
- d. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan pengugat dipersidangan, pemeriksaan saksi-saksi dan pembacaan putusan.
- e. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila yang terlihat nyata dalam sikap para pihak bahwa ketidak rukunan antara suami istri tidak terlalu parah maka Majelis Hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum dapat dijadikan alasan perceraian. Karena itu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi.

Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya

dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya diantaranya :

- a. Perselisihan yang menyangkut keuangan, karena istri dianggap boros, atau karena suami tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri.
- b. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual.
- c. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama sehingga menimbulkan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya suatu keretakan perkawinan harus dapat dibuktikan bahwa alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan peristiwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Misalnya telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh salah seorang diantara suami istri dan perbuatan tersebut merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1974.

Namun perbuatan tersebut dimaafkan oleh pihak yang lain dan tidak menjadi masalah dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan dengan perceraian, karena perkawinan antara suami istri dapat dipulihkan kembali.

Untuk dapat bercerai harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah mengakibatkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan pengugat dan tergugat. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan putusan.

Dengan kewenangannya, seorang hakim berhak memutuskan apakah perceraian ditolak atau dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim ini meliputi dalil gugatan, bantahan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, selanjutnya hakim akan menarik kesimpulan terbukti atau tidaknya gugatan itu. Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya yaitu keyakinan terhadap kondisi rumah tangga pasangan suami istri tidak mungkin hidup rukun lagi sehingga rumah tangga tidak mungkin diselamatkan. Penilaian hakim berdasarkan pada kenyataan dalam rumah tangga bahwa perselisihan itu sudah

sangat lama dan parah sehingga perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.⁵⁰⁾

Dengan demikian tujuan dari perkawinan tidak terwujud. Selanjutnya hakim berkeyakinan dengan keadaan seperti itu perceraian lebih baik dikabulkan daripada perkawinan tetap dipertahankan terus daripada tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan bagi mereka dan amat merugikan pertumbuhan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pertimbangan hakim apabila ada komulasi masalah perceraian dengan melihat alasan-alasan perceraian perceraian yang diajukan oleh para pihak, dengan memperhatikan alasan yang paling menonjol serta terbukti tidaknya gugatan. Selain itu hakim juga berpedoman pada adanya suatu keyakinan bahwa keadaan rumah tangga suami istri tersebut telah pecah (syiqaq) dan tidak mungkin diselamatkan lagi.⁵¹⁾

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perpecahan, biasanya tidak berdiri sendiri (merupakan komulasi). Satu dan lain hal saling mempengaruhi alasan-alasan perceraian para pihak saling berkait antara satu alasan dengan alasan yang lainnya, dengan pengertian bahwa satu alasan menjadi penyebab adanya alasan perceraian yang

⁵⁰⁾ Domiri, wawancara, hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 17 Juni 2007.

⁵¹⁾ Zaenuri, wawancara, hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 15 Juni 2007

lain. Misalnya dalam hal ketidakharmonisan suami istri karena dipicu oleh pindah agama dari salah satu pihak yaitu suami atau istri sedangkan pihak yang lain tidak menyetujui keadaan tersebut, kemudian pihak istri atau suami pergi dari tempat kediaman bersama, suami bertindak kasar, suami tidak memberi nafkah kepada istri meninggalkan keluarga atau pergi dari rumah yang pada awalnya dilakukan dengan alasan yang jelas namun lama kelamaan tidak ada kabarnya.

Alasan-alasan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Kalau peristiwanya telah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, penerapan hukumnya akan mudah. Namun apabila tidak menemukan hukum yang jelas dan tegas, maka Majelis Hakim dapat berijtihad dalam arti menciptakan hukum sendiri dengan cara menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan.⁵²⁾

Dengan kewenangannya seorang hakim berhak memutuskan apakah perceraian ditolak atau dikabulkan.

Dalam pertimbangan hukumnya pasal-pasal yang dijadikan pertimbangan hakim adalah yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9

⁵²⁾ Ichtiyanto, Tanggung Jawab Hakim, Mimbar Hukum, No. 47, tahun XI, Jakarta :2000, hal. 5.

tahun 1975 dan dalil-dalil hukum sayara'. Dalil-dalil yang dipakai bersumber dari al Qurr'an dan al hadits, baru pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadai dasar dari p-utusan itu. Adapun kitab-kitab fiqh yang dipakai sebagai dasar dari putusan itu. Adapun kitab-kitab fiqh yang dipakai sebagai dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta yaitu:

- a. Al Asbab Wal Nadoir
- b. Al Bajuri
- c. Kifayatul Akhyar
- d. Al Muhadab
- e. lanatut Tholibin
- f. Tuffah
- g. Mughnil Muhtaj
- h. Fakhul Muin
- i. Al Anwar
- j. Bughyatul Mustarsidin
- k. Fatkul Wahab
- l. Syarkawi Alal Tahrir. ⁵³⁾

Penyelesaian perceraian diakhiri dengan dibacakannya putusan hakim dimuka persidangan. Dalam memutus perkara

⁵³⁾ Zaenuri, Wawancara, hakim Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 15 Juni 2007

hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan para pihak. Sebelum putusan perceraian itu dijatuhkan, hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa kearah perdamaian. Disamping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasarnya alasan perceraian itu sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.

Untuk melengkapi kajian ini penulis mengambil 3 (tiga) kasus sengketa alasan perceraian disebabkan percekcoan atas dasar pindah agama tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama Surakarta. Adapun gambaran singkat kasus ini sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 335/Pdt.G/2006/PA.SKa

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang perceraian karena pindah agama (murtad) antara Joko Sudarmanto bin Sardjiman dalam hal ini sebagai Penggugat melawan Yudith Hastarini binti Sukarno sebagai Tergugat. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Nopember 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/02/XI/2002, tanggal 2 Nopember 2002
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bibis Baru selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raflika Duri Saputra, lahir tanggal 24 Juni 2003.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan tidak disetujui orang tua Termohon akan tetapi karena Termohon terlanjur hamil maka orang tua Termohon menyetujui dan nanti setelah anak lahir Pemohon dan Termohon akan dipisahkan sedangkan Pemohon sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga karena Pemohon mencintai Termohon.
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2003 setelah melahirkan sembilan hari, Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada saat Pemohon sedang bekerja, dan sebelumnya tidak pamit dengan Pemohon

sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama tiga tahun tiga bulan.

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama tiga tahun tiga bulan Pemohon sudah tiga kali ke rumah Termohon dengan maksud untuk mengajak hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Termohon bahkan seringkali didiamkan saja di rumah Termohon sehingga Pemohon enggan untuk datang lagi ke rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dalam sidang telah menyampaikan keterangan tambahan bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah cekcok mulut.
- Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil. Pemohon kecuali hal-hal sebagai berikut :
 - Mengenai nama dan tanggal lahir anak, menurut Termohon yang benar bernama Raflika Atala Saputra lahir tanggal 19 Mei 2003
 - Mengenai sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut Termohon yang benar karena Pemohon membohongi Termohon. Termohon sudah berjanji akan memeluk agama Islam untuk selamanya ternyata setelah menikah kembali masuk agama Katolik

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan keluarga**
- **Bahwa meskipun Termohon telah mengakui sering cekcok mulut dan mengakui telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Pemohon juga telah membenarkan jawaban Termohon bahwa sebab pertengkaran karena Termohon kembali memeluk agama Katolik tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perselisihan keluarga maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga masing-masing pihak dan orang-orang yang dekat dengan mereka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975**
- **Bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga Pemohon yang bernama Tutik Karmini dan Sardjiman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :**
 - **Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya**
 - **Bahwa Pemohon sekarang kembali memeluk agama Katolik**
 - **Bahwa sebagai keluarga ia sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil,**

- Bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga Termohon yang bernama Sukarno yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya
 - Bahwa Pemohon sekarang kembali memeluk agama Katolik
 - Bahwa sebagai keluarga ia sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil,
- Bahwa keterangan keluarga Pemohon dan keterangan keluarga Termohon telah memperkuat dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon berselisih terus menerus disebabkan Pemohon telah kembali memeluk agama Katolik
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti berselisih terus menerus disebabkan Pemohon telah kembali memeluk agama Katolik. Dengan demikian maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
- Bahwa meskipun dalam petikan permohonannya Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tetapi oleh karena hak talak Pemohon telah gugur

disebabkan telah memeluk agama Katolik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat diputus dengan fasakh. Sesuai dengan ibarat yang terdapat pada Kitab Al Ahwalusyahsiyah halaman 114, yang artinya :

Suatu perkawinan difasakh dengan sebab murtadnya salah seorang dari suami atau istri.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan
- Bahwa oleh karena antara Termohon dengan Pemohon telah terbukti selalu berselisih disebabkan Pemohon telah kembali memeluk agama Katolik maka dalil permohonan Pemohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan

Analisis Kasus

Menurut penulis dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan saksi-saksi yang ternyata keterangan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, terutama tentang terjadinya pindah agama agama pengugat setelah menikah kembali masuk agama Katholik, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama, dan tidak adanya kemauan dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dan rukun dalam rumah tangga yaitu dengan kepergian istri dari kediaman bersama karena istri tidak setuju dengan alasan suami untuk pindah agama sehingga

timbullah perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi. Sehingga pintu perceraian adalah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, karena apabila rumah tangga dilanjutkan akan membawa penderitaan lahir dan batin bagi keduanya.

Dasar hukumnya yang dipakai adalah 3 Pasal dan bila dikaitkan dengan kasus itu sudah sesuai, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yaitu

antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

2. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusan perceraian dalam kasus itu fasakh yaitu putusannya perkawinan atas kehendak hakim sehingga permohonan Pemohon untuk mengucapkan talak didepan sidang pengadilan tidak dikabulkan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan fasakh bukan talak sebab pengugat tidak lagi beragama Islam (murtad) padahal lembaga ikrar talak diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam. Pendapat Majelis Hakim menjatuhkan putusan fasakh bukan talak tersebut sudah benar.

Menurut hukum Islam putusan fasakh ini merupakan putusannya perkawinan atas kehendak hakim.

Dasar pokok hukum fasakh adalah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya, karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai suami isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau kalau perkawinan tersebut dilanjutkan maka keadaan kehidupan rumah tangganya menjadi buruk

2. Putusan Nomor : 76/Pdt.G/2007/PA.Ska, perkara gugat cerai

Bahwa Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang perceraian karena pindah agama (murtad) antara Tri Trisnawati binti R. Sugeng Suwardjo Saputro dalam hal ini sebagai Penggugat melawan Eddy Rahardjo bin Rejomulyo sebagai Tergugat tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 1986, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/32/VI/1986, tanggal 25 Juni 1986

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik sebagaimana yang tercatat dalam Buku Nikah
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Semarang selama lima tahun, kemudian pindah di jalan Siwalan Nomor : 26 RT. 03 RW. XIV, Kelurahan Laweyan, Kota Surakarta hingga sekarang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 1. Ledo Krisna lahir tanggal 30 April 1987
 2. Ega Krisma lahir tanggal 11 Desember 1988
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram yang disebabkan :
 - Tergugat selaku kepala keluarga dan tulang punggung keluarga tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya,
 - Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan yang sangat prinsip, dimana setelah menikah Tergugat kembali ke agama semula yakni agama Katolik,
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan dalih untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar membimbing Tergugat agar memeluk agama Islam dengan taat, tetapi tidak berhasil

- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima dan mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Surakarta
- Bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang isi pokoknya membenarkan semua dalil Penggugat terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan atau dalil Penggugat mengajukan perkara cerai gugat pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah dan karena perbedaan prinsip akibat beda agama, Tergugat beragama Katolik dan Penggugat beragama Islam
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat oleh keterangan keluarga penggugat dan orang dekat Tergugat masing-masing bernama Pratini Sugeng dan Guntur Dewanto, telah membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut
- Bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut diatas, yang ternyata dari akibat pertengkarannya kemudian keduanya, maka dapat

disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, meskipun telah diusahakan perdamaianya oleh Majelis melalui persidangan maupun keluarganya

- Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, menurut Majelis hal itu justru akan menimbulkan madhorot bagi keduanya, oleh karenanya hukum dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam Kitab Bidayatul Muhtajid Juz H halaman 86 yang artinya sebagai berikut:

“Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madharat, apabila sudah terang tidak dapat dirukun kembali”

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak baik dari Tergugat kepada Penggugat.

Analisa kasus

Menurut penulis bahwa perselisihan dalam rumah tangga dalam kasus diatas disebabkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga, dan adanya perbedaan prinsip dalam hal agama yaitu tergugat sudah pindah agama (murtad) sehingga menimbulkan perginya tergugat dari tempat tinggal bersama antara pengugat dan tergugat. Dan dalam persidangan tergugat tidak akan mengajukan alat bukti dan membenarkan semua dalil yang diajukan pengugat. Dalam kasus tersbut ada komulasi masalah yaitu masalah tergugat yang tidak memberi nafkah dan alasan pindah agama. Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama waktu tersebut tidak menunjukkan adanya perbaikan hubungan diantara keduanya, sehingga tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai.

Menurut penulis bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sudah tepat sebagai berikut :bahwa Majelis Hakim menilai Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan saksi-saksi yang ternyata keterangan satu dengan yang lainnya seling berkesesuaian, maka diambil kesimpulan bahwa

pertengkaran dalam kasus diatas disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada keluarga, karena Pengugat dan tergugat yang berpisah rumah (tempat kediaman bersama) selama 2 (dua) tahun disebabkan perselisihan dalam keluarga dan karena perbedaan prinsip akibat pindah agama Pengugat setelah menilkah kembali masuk agama Katholik.

Menurut penulis dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut majelis hakim menentukan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut : bahwa diantara suami istri tersebut telah menunjukkan sikap perselisihan yang sangat parah. Kualifikasi hakim bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga.

Dasar hukumnya yang dipakai Majelis Hakim sudah sesuai dengan kasusnya dan ada 3 (tiga) pasal yang dipakai untuk memutuskan perceraian yaitu berdasarkan pasal :

mengambil dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f)dan (h)

1. Pasal 19 huruf (f) berbunyi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

2. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam berbunyi :

antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

3. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum Islam berbunyi :

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Putusan Nomor : 432/Pdt.G/2003/PA.Ska, Perkara gugat cerai

Bahwa Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang perceraian karena pindah agama (murtad) antara Emi Susilowati Binti Sunarto dalam hal ini sebagai Penggugat melawan Ignatius Listyono Bin Slamet Poerwono sebagai Tergugat tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Desember 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor : 432/Pdt.G/2003/PA.Ska. mengajukan hal-hal sebagai berikut :**
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KUA, Kecamatan Serengan, Surakarta, tanggal 22 Maret 1995, Nomor 96/39/III/1995**
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth ta'lik talak sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah**

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bersama di Kemasan ikut orang tua Penggugat, 6 tahun dan berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Novita Ernawati, lahir tanggal 8 Nopember 1996
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan sejak habis pernikahan baru berjalan 3 hari, disebabkan
 - Tergugat kembali ke agamanya (Katolik) namun Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut
- Bahwa sekitar bulan Juni 2001, Penggugat dan tergugat pindah rumah kost di Turisari, Solo dengan harapan Penggugat rumah tangganya bisa baik, namun Penggugat dan Tergugat cekcoknya malah semakin parah percekcokannya, lalu kost yang baru sekitar 3 minggu, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, dengan alasan Tergugat dapat panggilan kerja
- Bahwa setelah Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua, lalu Tergugat pergi hingga sekarang ini kurang lebih 20 bulan belum pernah pulang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sehingga Tergugat telah melalaikan kewajiban Tergugat sebagai suami dan bapak yang baik bagi istri dan anaknya

- **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat**
- 2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian**
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Novita Ernawati berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya**

Menimbang bahwa isi gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah dua hal, yang pertama mengenai gugatan cerai dan kedua mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, didalam persidangan telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka

Menimbang bahwa oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangan

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama \pm 11/2 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah menengok dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Menimbang bahwa dengan tindakan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun di dalam memenuhi keperluan hidup berumah tangga, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah yang telah diucapkannya sesudah akad nikah dengan Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp.1000,- (Seribu Rupiah) kepada Majelis sebagai pembayaran iwadl (pengganti), maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat

dengan Tergugat sebagai akibat dari pelanggaran ta'lik talak Tergugat, hal ini sesuai dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II/301 yang artinya :

“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang bahwa mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Novita Ernawati yang lahir tanggal 8 Nopember 1996 dituntut oleh Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhannya

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa bagi anak yang masih dibawah mumayyiz untuk perkembangan jiwanya masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, hal ini adalah sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu karena Penggugat sebagai ibunya yang ternyata hingga saat ini masih tetap beragama Islam, maka hak pemeliharaan dan pengasuhan anak dapat dipertimbangkan kepada Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut mumayyiz atau telah dapat memilih untuk mengikuti Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya. Sesuai syarat bagi yang akan melakukan hadhanah, sebagaimana yang terdapat pada Kitab Kifayatul Ahyar juz II halaman 94, yang artinya :

Syarat bagi orang yang melakukan hadhanah ada 7 macam, yaitu : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon mengenai hadhanah patut dikabulkan.

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Novita Ernawati yang lahir 8 Nopember 1996 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

Analisa Kasus :

Menurut penulis dalam kasus diatas bahwa adanya persesihan dalam rumah tangga tersebut disebabkan perbedekaan prinsip agama antara tergugat dan pengugat. Sudah pisahnya tergugat dan pengugat selama 1,5 tahun dan tidak ada tanggung jawab tergugat untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal pernikahan berlangsung dan selama waktu tersebut tidak ada menunjukkan adanya perbaikan hubungan diantara keduanya.

Menurut penulis bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan dalam kasus tersebut diletakkan pada titik berat bahwa Pengugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarga. Selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa pengugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi pengugat maupun memenuhi keperluan hidup berumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 (1) Undang-undang Perkainan Nomor 1 tahun 1974 yaitu suami wajib mwindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tanga sesuai dengan kemampuannya. Karena hal tersebut pengugat dapat mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 3 yaitu jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini pengugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan kepengadilan.

Majelis jhakim juga memberikan pertimbangan hokum mengenai tidak diberikannya nafkah suami kepada isteri bahwa tergugat talah melanggar ta'klik talak angka 2 dan 4 sebagaimana disebutkan dalam buku kutipan akta nikah.

Menurut penulis alasan perceraian disebabkan percekcoan atas dasar pindah agama dan suami yang sering bertindak kasar yang diajukan penguygat tidak dipakai sebagai pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini hakim menilai bahwa titik berat perselisihan keluarga tersebut karena kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah dari suami kepada istri serta anaknya tidak dilaksanakan.

Karena kualifikasi perkara adalah pelanggaran ta'lik talak maka dasar hukumnya perceraian tersebut jika dikaitkan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan adalah :

Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Suami melanggar ta'lik talak

Ta'klik talak yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Ta'kil talak dibacakan oleh pihak suami pada saat akad nikah berlangsung, yang dicantumkan dalam akta nikah. Ta'lik talak adalah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, yang mungkin saja terjadi dimasa mendatang. Perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, dalam arti jika

suami tidak memmenuhinya, maka si istri yang tidk rela itu tidak dapat mengajukannya kepengadilan sebagai alasan perceraian.

Akibat tidak disetujuinya pindah agama dalam perkawinan menyebabkan terjadinya percekcoan terus menerus dalam rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi tidak tentram dan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri maka diambil keputusan untuk bercerai. Memang secara hukum Islam pindah agama dalam perkawinan mengakibatkan perkawinan menjadi fasakh (perkawinanbatal,namun dalam pertimbangan hukum oleh hakim tidak selali diputus fasakh. Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan alasan apa yang paling menonjol sehingga rumah tangga menjadi retak, dengan demikian dilihat secara kasus per kasus.

Pengadilan berkewajiban untuk menyelesaikan masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga bila ada permohonan cerai baik melalui cerai talak maupun cerai gugat. Kemudian hakim memeriksa perkara dengan hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara perdata. Selanjutnya hakim akan menilai apakah alasan yang diajukan memenuhi alasan untuk bercerai yang ditentukan oleh undang-undang, ada saksi-saksi yang memberikan keterangan tentang hal itu, ada bukti yang membenarkannya serta ada keyakinan hakim bahwa rumah tangga

tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka dapat diputus cerai oleh pengadilan. Selanjutnya dengan kewenangannya hakim akan memutuskan untuk mengabulkan atau menolak gugatan.

B. Akibat perceraian karena perkecokan atas dasar pindah agama

B,1. Terhadap anak

Perceraian membawa akibat dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan anak karena baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk menjalankan kewajiban tersebut terutama bagi anak-anaknya yang belum cukup umur semata-mata demi kepentingan si anak. Hal tersebut seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Bahkan tak jarang antara mantan suami atau mantan istri saling berebut. Salah satu pihak merasa lebih berhak mengasuh anak-anaknya. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga atau pun dengan keputusan pengadilan.

Pemeliharaan terhadap anak yang orang tuanya bercerai hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya seperti dalam ikatan perkawinan. Dasar hukum hadhnah tersebut mengikuti firman Allah dalam surat Al baqarah (2) ayat 233 :

“Adalah kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.”

Jika tidak terjadi sengketa antara ayah dan ibu tentang hak asuh anak ini, maka tidak akan menjadi persoalan. Dalam hal pengasuhan anak dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak dimasukkan dalam gugatan perceraian. Akan tetapi jika persoalan ini dimasukkan dalam gugatan perceraian, maka harus diselesaikan di pengadilan untuk memutuskan siapakah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Kewajiban memelihara anak bukan hanya berlaku selama bapak ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja namun juga berlanjut setelah mereka bercerai. Dalam kasus perceraian yang penulis kemukakan ada hal yang harus diperhatikan mengenai bagaimana hak pemeliharaan (hadhanah) setelah perceraian orang tuanya terjadi.

Diantara semua perkara alasan perceraian disebabkan perceraian atas dasar pindah agama yang masuk pada Pengadilan Agama Surakarta maka permohonan pemeliharaan anak (hadhanah) sangat rendah. Rendahnya kasus hadhanah ini ada 3 sebab yaitu masalah hadhanah dapat diputuskan secara musyawarah atau karena menernima saran dari Majelis Hakim untuk membebaskan saja anak akan ikut siapa atau memang tidak dibicarakan karena masalah ekonomi tidak mampu membiayai

anak, tidak bekerja atau karena kurang peduli dan perhatian terhadap anak.⁵⁴⁾

Saran majelis hakim untuk dibebaskan saja artinya tidak ditetapkan ikut ayah atau ibu dengan pertimbangan psikologi anak dikemudian hari bila ada penetapan dari pengadilan misal bila ditetapkan pada ibu, maka bapak jadi ragu untuk mengunjungi anak karena ibu merasa lebih berhak sehingga dikhawatirkan ada perebutan anak, kalau mau diajak pergi ayah ada kekhawatiran tidak dikembalikan pada ibunya, dengan keadaan demikian anak akan menjadi tertekan.⁵⁵⁾

Jika tidak terjadi sengketa antara ayah dan ibu tentang hak hadhanah ini, maka tidak akan menjadi persoalan. Dalam hal hadhanah dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak dimasukkan sebagai permohonan bersama-sama dengan permohonan gugtan perceraian. Akan tetapi jika ada permohonan tentang pemeliharaan anak (hadhanah) yang dimasukkan juga bersama-sama dalam gugatan perceraian, maka hakim akan memutuskan siapakah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Secara normative memang hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun akan jatuh ketangan ibu, namun ketentuan ini bukan bersifat mutlak sebab bisa saja jatuh

⁵⁴⁾ Zaenuri, wawancara, hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 15 Juni 2007

⁵⁵⁾ Raharjo, wawancara, hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 16 Juni 2007

kepada bapaknya karena pertimbangan hakim meliputi beberapa segi misalnya melihat juga kondisi kedua orang tua apakah bapak atau ibu tepat untuk memelihara anak atau tidak, kemampuan ekonominya untuk memelihara anak, umur anakm waktu dan kedekatan emosi dengan anak, kemampuannya untuk memberi perlindungan secara jasmani dan rohani bagi anak. Sebagai contohdalam hal pekerjaannya menjadi tenaga kerja Indonesia atau si pemohon pemeliharaan anak telah terbukti dipersidangan berselingkuh, berzina, berkelakuan tidak baik misal pemabuk, pemadat, penjudi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau kelakuan yang tidak baik lainnya dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan tentu saja pemeliharaan anak tidak akan diberikan kepadanya.⁵⁶⁾

Meski anak yang sudah (mumayyiz) berhak untuk memilih untuk dipelihara ayah atau ibunya namun hal itu tidak bersifat mutlak, sebab kondisi pihak yang dipilih akan menjadi pertimbangan hakim. Artinya apakah pihak yang dipilih tersebut benar-benar mampu dan layak untuk mengasuh anak atau tidak, sehingga Hakim pun dapat memberi putusan berbeda dari yang dipilih anak.⁵⁷⁾

Menurut 5 (lima) responden yang penulis temui menyatakan bahwa mereka memilih untuk menyelesaikan masalah

⁵⁶⁾ Domiri, wawancara, hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 17 Juni 2007

⁵⁷⁾ Zaenuri, wawancara, hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 15 Juni 2007

pemeliharaan anak (hadhanah) secara musyawarah sedangkan 1 (satu) responden memilih menyelesaikannya melalui penetapan pengadilan.

Menurut Joko Sudarmanto menyatakan tidak mengajukan pengasuhan anak mereka, raflika Duri saputra karena menurut saran dari majelis hakim untuk membebaskan saja anak mereka dari permohonan hadhanah. Anaknya juga masih terlalu kecil, kasihan kalau anak harus dipisahkan dari ibunya dan diperebutkan, akan lebih baik apabila diasuh oleh ibunya. Mengenai kehidupan sehari-hari anaknya akan diperhatikan dengan memberikan uang secara teratur setiap bulan kepada Yudith untuk dipakai mencukupi kebutuhan anaknya.⁵⁹⁾

Sedangkan menurut Yudith hastarini menyatakan sudah semestinya anaknya diasuh olehnya karena sejak lahir anaknya selali dalam pengasuhannya, sehingga tidak pernah lepas darinya. Suaminya memahami hal itu, sehingga dia tidak mempermasalahkannya. Apabila suaminya akan bertemu dengan anaknya dia tidak keberatan. Dan suaminya juga berkewajiban memberikan biaya hidup pada anaknya.⁶⁰⁾

Menurut Tri Trisnawati tidak mengajukan permohonan pemeliharaan anak (hadhanah) karena sudah ada kesepakatan

⁵⁹⁾ Joko Sudarmanto, wawancara, pihak suami yang cerai karena pindah agama, Surakarta 22 Juni 2007

⁶⁰⁾ Yudith Hastarini, wawancara, pihak istri yang cerai karena pindah agama, Surakarta 23 Juni 2007

dengan suaminya bahwa masalah anak tidak akan diperebutkan, karena suaminya sudah mempercayakan pemeliharaan anak kepadanya sehingga tidak ada masalah lagi.⁶⁰⁾

Menurut Eddy Rahardjo, dirinya tidak keberatan apabila anaknya diasuh oleh ibunya, karena sudah ada kesepakatan dengan istrinya dan selama ini biaya hidup anak-naknya memang dicukupi oleh ibunya dan karena dirinya memang tidak bekerja.⁶¹⁾

Menurut Emi Susilowati dirinya mengajukan permohonan penetapan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ke pengadilan karena suaminya selama ini telah berbuat kasar pada dirinya, sehingga dia takut kalau suaminya berlaku demikian pada anaknya. Selain itu dengan ikut ayahnya, dikhawatirkan anaknya tidak akan mendapat bimbingan yang terarah. Dengan adanya penetapan dari pengadilan dirinya merasa tenang. Hal itu sekaligus dengan maksud untuk melindungi anaknya agar sewaktu-waktu tidak direbut oleh suaminya. Selain itu dia bermaksud untuk mendidik anaknya menurut akidah yang selama ini diyakininya.⁶²⁾

Menurut Ignatius Listyono tidak mempermasalahkan tentang penetapan hak asuh anak akan ikut siapa, karena meski

⁶⁰⁾ Tri Trisnawati, Wawancara, pihak istri yang cerai karena pindah agama, Surakarta 24 Juni 2007

⁶¹⁾ Eddy Rahardjo, Wawancara, pihak suami yang cerai karena pindah agama, Surakarta 25 Juni 2007

⁶²⁾ Emi Susilowati, Wawancara, pihak istri yang cerai karena pindah agama, Surakarta 27 Juni 2007

anak diasuh dan dipelihara oleh ibunya dirinya masih berhak untuk tetap mengunjungi anaknya dan sesekali memberi biaya hidup yang diperlukan anaknya. Dan dia berharap istrinya tidak akan menghalang-halangi maksudnya tersebut.⁶²⁾

Hak untuk mengajukan permohonan hadhanah setelah terjadi proses perceraian merupakan hak suami dan istri. Putusan permohonan itu diberikan dengan pertimbangan melihat beberapa segi bukan hanya dari segi normative saja antara lain kemampuan ekonomi, umur anak, kondisi pihak yang memelihara anak, kelakuan orang yang mendidik anak dan dengan melihat bukti-bukti pemeriksaan selama persidangan.

B.2. Terhadap Harta

Bahwa selama proses perceraian atau setelah perceraian yang terjadi di pengadilan bahwa para pihak tersebut dapat menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Terhadap pembagian harta bersama para pihak harus dapat membuktikan bahwa harta yang baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang ada didalam rumah tangga mereka merupakan harta bersama.

Permohonan pembagian harta bersama boleh digabungkan dengan permohonan perceraian karena permohonan tersebut

⁶²⁾ Ignatius Listyono, Wawancara, pihak suami yang cerai karena pindah agama, Surakarta 28 Juni 2007

sifatnya *assessor* terhadap permohonan perceraian. Jika permohonan cerai ditolak maka permohonan pembagian harta bersama suami istri tidak dapat diterima. Jika permohonan cerai diterima atau dikabulkan baru terbuka kemungkinan pembagian harta bersama suami istri dikabulkan, sepanjang barang-barang yang ada tersebut dapat dibuktikan memang harta bersama.⁶⁴⁾

Perkara pembagian harta bersama adalah perkara yang mengandung sengketa yang diajukan kemuka hakim untuk diperiksa sampai diputuskan oleh hakim. Karena adanya sesuatu hak dari pengugat yang dilanggar oleh tergugat, maka oleh pengugat dalam tuntutananya meminta bagian haknya kepada tergugat melalui putusan pengadilan. Putusan hakim artinya pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentstius*).

Bahwa selama proses peridangan terhadap harta bersama tersebut belum dibagi, apabila ada kekhawatiran atas keutuhan barang-barang sengketa tersebut dialihkan kepada pihak ketiga maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan hakim yang telah

⁶⁴⁾ Zaenuri, wawancara, hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta, 9 Juli 2007

mempunyai kekuatan hukum tetap artinya keputusan hakim yang dapat dijalankan (mempunyai kekuatan eksekusi), terhadap putusan hakim tersebut tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Untuk melengkapi kajian ini berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa pembagian harta yang ada saat terjadinya perceraian yang diselesaikan dengan musyawarah adalah :

- a. Pasangan suami istri Joko Sudarmanto dan Yudith hastarini menikah pada 2 Nopember 2002 dan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2006. bahwa harta-harta yang mereka peroleh saat menikah sampai dengan perceraian adalah 1 buah televisi berwarna 17 inchi merk Samsung dibeli oleh Joko Sudarmanto tahun 1997, 1 buah sepeda motor Honda Grand Nopol AD 4632 JA tahun 1995 dibeli oleh Joko Sudarmanto tahun 1997, sebidang tanah dan bangunan HM No.342/Nusukan seluas 150 m2 yang terletak di Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta yang tercatat atas nama Joko Sudarmanto yang diperoleh dari warisan bapaknya tahun 2000, 1 buah gelang emas 2 gram yang dibeli oleh Yudith Hastarini tahun 2004.⁶⁵⁾

Menurut penulis pembagian harta akibat perceraian tersebut yaitu :

i. Harta-harta Joko Sudarmanto :

⁶⁵⁾ Joko Sudarmanto dan Yudith Hastarini, wawancara pasangan suami istri yang cerai karena pindah agama, Surakarta 13 Agustus 2007

- a. Harta bawaan : 1 buah televisi berwarna 17 inchi merk Samsung, 1 buah sepeda motor Honda dengan nomor polisi AD 4632 JA
 - b. Harta warisan : sebidang tanah dan bangunan HM No.342/Nusukan seluas 150 m2 yang terletak di Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta.
- ii. Harta-harta Yudith Hastarini : tidak ada
 - iii. Harta bersama : 1 buah gelang emas 2 gram
- b. Pasangan suami istri Eddy Raharjo dan Tri Trisnawati menikah pada tanggal 25 Juni 1986 dan bercerai pada tanggal 3 April 2007. bahwa harta-harta yang mereka peroleh saat menikah sampai dengan perceraian adalah : 1 buah gelang emas 2 gram dibeli oleh Tri Trisnawati tahun 1984, 1 buah sepeda motor Astrea Prima Nopol AD 3342 JH yang dibeli oleh Edy Raharjo tahun 1987, 1 buah sepeda motor Honda Grand tahun 1995 dibeli oleh Tri Trisnawati tahun 1997 Nopol AD 6321 JA, sebidang tanah dan bangunan seluas 125 m2 terletak di Jalan Siwalan Nomor 26 Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang tercatat atas nama Edy Raharjo dan Tri Trisnawati yang dibeli tahun 2001.⁶⁶⁾

Pembagian harta akibat perceraian tersebut yaitu :

- i. Harta bawaan Edy Raharjo : tidak ada

⁶⁶⁾ Edy Rahardjo dan Tri Trisnawati, wawancara pasangan suami istri yang cerai karena pindah agama, Surakarta 14 Agustus 2007

- ii. Harta Tri Trisnawati : 1 buah gelang emas 2 gram
 - iii. Harta bersama : 1 buah sepeda motor Honda Grand Nopol AD 6321 JA, 1 buah sepeda motor Astra Prima Nopol 3342 JH dan sebidang tanah dan bangunan seluas 125 m2 terletak di Jalan Siwalan Nomor 26 Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang tercatat atas nama Edy Raharjo dan Tri Trisnawati.
- c. Pasangan suami istri, Ignatius Listyono dan Emi Susilowati yang menikah pada tanggal 22 Maret 1995 dan bercerai 10 Maret 2003. Bahwa harta-harta yang mereka peroleh pada saat menikah sampai dengan perceraian adalah : 1 buah sepeda motor Honda Grand AD 7321 KH dibeli oleh Ignatius Listyono tahun 1997, sebidang tanah dan bangunan HM.217/Gilingan seluas 200 m2 yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kota Surakarta yang diwariskan oleh ibu Emi Susilowati tahun 1988 dan 1 buah sepeda motor Honda Grand nopol AD 8753 JA dibeli oleh Emi Susilowati tahun 2000.⁶⁷⁾**
- Pembagian harta akibat perceraian tersebut yaitu :**
- i. Harta bawaan Ignatius Listyono : tidak ada**
 - ii. Harta Emi Susilowati sebagai harta warisan : sebidang tanah dan bangunan HM.217/Gilingan seluas 200 m2 yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kota Surakarta**

⁶⁷⁾ Ignatius Listyono dan Emi Susilowati, wawancara pasangan suami istri yang cerai karena pindah agama, Surakarta 15 Agustus 2007

iii. Harta bersama : 1 buah sepeda motor Honda Grand AD 7321 KH dan 1 buah sepeda motor Honda Grand nopol AD 8753 JA

Pada ketiga kasus diatas karena tidak dibuat perjanjian kawin, maka pembagian harta dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau harta warisan kembli kepada penguasaan masing-masing sedang harta bersama dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat setengah bagian.

Pembagian harta diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Alasan perceraian disebabkan percekocokan atas dasar pindah agama banyak terjadi di masyarakat. Pada akhirnya pasangan suami istri yang memilih untuk membawa kasus ini kepengadilan dengan harapan status hukum terhadap perkawinannya akan menjadi jelas. Majelis Hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Meski secara hukum Islam perkawinan mereka telah fasakh (batal), namun dalam pertimbangan hukumnya tidak selalu diputus fasakh. Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan.

Terjadinya perceraian tentunya membawa akibat terhadap anak, akrena tanggung jawab orang tua tidak menjadi putus karena adanya perceraian. Permohonan hak pemeliharaan anak (hadhanah⁰ yang diajukan kepengadilan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonominya untuk memelihara anak, umur anak, waktu dan kedekatan emosi dengan anak, kemampuannya untuk memberi perlindungan secara jasmani dan rohani bagi anak. Sedangkan

akibat perceraian terhadap harta bersama yaitu setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri akan dibagi masing-masing setengah bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Saran

Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1974.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hope, 1999.
- Dairabi, Ahmad bin Umar, *Fiqh Nikah dan Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, Jakarta : Mustaqiin, 2003.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Press, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : Zahir Trading, 1975.
- Ictianto, *Tanggung Jawab Hakim*, Mimbar Hukum, no.47, tahun XI, Jakarta, 2000.
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.

- Muhtar, Kamal, *Asas-asas tentang Hukum Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Nasution, M. Yunan Helmi, *Bunga Rampai Ajaran Islam*, Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1982.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1963.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1987.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan*, Surabaya : Airlangga University Press, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1976.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung : Alumni, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 1998.
- Sayuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : University Indonesia Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa 1976.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : BPFE, 1991.

Syahr dan Saidus, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Bandung : Alumni, 1976.

_____, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung : Alumni 1996.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta : 2006.

Syaukani, Al Imam Muhammad Asy, *Nailul Authar Jilid VI*, Semarang : Asy Syifa, 2001.

Thaha, Nasrudin, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1960.

Thalib, M., *Fiqih Nabawi*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995.

Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : Kumudasmoro, 1994.

Perundang-undangan :

Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.

